



Pengaruh Kemiskinan Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Khususnya Inflasi dan Pengangguran di Kota Surabaya

Ismi Rosyidatul Ummah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : Izmyrosyidatul123@gmail.com

Achmad Alfian Azizi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : achmad.alfiyan95@gmail.com

Muhammad Yasin

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : yasin@untag-sby.ac.id

Korespondensi penulis: Izmyrosyidatul123@gmail.com

Abstract. *The purpose of this research is to ascertain how poverty affects Surabaya's ability to develop economically. In this research, the degree of poverty, economic development, inflation, and unemployment in Surabaya are covered. The data used in this research are quantitative, or provided as numbers, making them first simpler to understand or compare. The data analysis approach in this research involves multiple linear regression to gather data and information, while SPSS22 is used to analyse the data. By employing software to verify the statistical significance of variables, data analysis was completed. The author additionally makes use of secondary data, data collection methods, and the documentation method while gathering and processing information from Surabaya City's Central Statistics Agency (BPS).*

Keywords: *Economic growth, inflation, poverty, unemployment*

Abstrak. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana kemiskinan mempengaruhi percepatan pembangunan ekonomi Surabaya. Tingkat kemiskinan, perkembangan ekonomi, inflasi, dan pengangguran di Surabaya semuanya dimasukkan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu fakta yang dinyatakan sebagai nilai numerik yang lebih mudah dipahami atau dibandingkan satu sama lain. Strategi analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan SPSS22 untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan informasi yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak untuk menentukan signifikansi statistik berbagai variabel. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya memberikan data primer kepada penulis, yang kemudian diolah dengan menggunakan data sekunder, metodologi pengumpulan data, dan metode dokumentasi.

Kata kunci : Inflasi, kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi

LATAR BELAKANG

Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu tempat mungkin menunjukkan seberapa baik telah dikembangkan. Tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah dan stabilitas keadaan ekonominya meningkat seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Semakin buruk keadaan perekonomian dan semakin rendah tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, maka semakin rendah pula tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDB), sering dikenal sebagai total produk dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian daerah selama periode waktu tertentu, digunakan untuk menghitung perekonomian suatu daerah.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran, pembangunan ekonomi, kemiskinan, dan kependudukan di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya. Warga kota Surabaya yang hidup dalam kemiskinan dan kehilangan pekerjaan masih ada. Jika tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi tidak segera diatasi, jumlah penduduk miskin dan pengangguran akan meningkat setiap tahunnya. Pendidikan rendah dan kriminalitas tinggi adalah akibat dari tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Mengingat hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, telah menjadikan pengurangan pengangguran, stabilisasi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan pertumbuhan penduduk sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan.

Tujuan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berfokus pada tenaga kerja juga dapat dibantu oleh pembangunan daerah. Dengan meningkatkan kesempatan kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan memastikan distribusi pendapatan sektoral dan individu yang adil, pembangunan ekonomi yang tinggi dapat membantu mengurangi pengangguran dan memberantas kemiskinan. Akibat pemusatan pembangunan, terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi; beberapa daerah telah mencapai kemajuan pesat, sementara yang lain mengalami kemajuan sedang dalam hal kegiatan ekonomi dan pendapatan rumah tangga. Hal ini karena tidak cukup sumber daya untuk mengelola, tidak cukup keterampilan manajemen, dan tidak cukup fasilitas untuk mendorong pertumbuhan daerah (BPS Kota Surabaya).

Masalah kemiskinan di Surabaya sangat kompleks karena banyak variabel sosial yang mempengaruhi budaya masyarakat serta penyebab berbagai jenis kemiskinan. Antara 2015 dan 2019, populasi miskin Surabaya secara keseluruhan menurun. Hal ini menjelaskan mengapa

implementasi strategi Pemerintah Kota Surabaya 2015–2019 untuk mengatasi persoalan jumlah orang miskin sangat efektif.

Upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan di Kota Surabaya dinilai sangat efektif, menurut temuan studi yang dilakukan oleh BPS Kota Surabaya antara tahun 2015 dan 2019. Angka kemiskinan menurun dari 5,82 pada tahun 2015 menjadi 5,63% pada tahun 2016. , menjadi 5,39% pada tahun 2017, menjadi 4,88% pada tahun 2018, dan menjadi 4,51% pada tahun terakhir, yang menunjukkan keberhasilan. Angka kemiskinan Surabaya pada tahun 2019 agak menurun namun tidak banyak, menjadi 4,51% dari total penduduk saat itu, atau 3.095,26 orang. Jumlah penduduk miskin di Surabaya telah menurun lebih dari 10.000 dari hampir 141.000 pada tahun 2018 menjadi hampir 131.000 pada tahun 2019, atau 4,51% dari jumlah penduduk, meskipun angka kemiskinan meningkat. Akibatnya, persentase penduduk miskin (P0) turun menjadi sekitar 0,37%. Meningkat menjadi 155.670 orang miskin di Surabaya pada Maret 2020. Wabah Covid-19 yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan sejalan dengan peningkatan jumlah orang miskin pada Maret 2020. Menurut BPS (2019), jumlah individu miskin yang tersisa cenderung masuk dalam kategori kemiskinan kronis karena jumlah orang miskin berkurang.

Pemulihan sebagai upaya jangka panjang untuk menurunkan angka kemiskinan meliputi peningkatan penguatan, pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Program Gerdu-Taskin (Gerakan Terpadu-Pengentasan Kemiskinan) yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui proses pembangunan masyarakat, dan Program Pengembangan Kawasan Ekonomi yang bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi lokal merupakan salah satu inisiatif yang telah dijalankan. . Baik dari segi administrasi maupun tujuan, tantangan tetap ada dalam memerangi kemiskinan.

Program atau inisiatif bersama yang melibatkan sektor publik dan korporasi, serta masyarakat setempat, merupakan upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Program dan kebijakan di Kota Surabaya harus direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sedangkan kesadaran masyarakat diperlukan untuk meningkatkan standar dan produktivitas. Agar usaha mikro dan kecil (UMK) dapat meningkatkan prospek kerja, pemerintah daerah harus terlebih dahulu memberikan dukungan dan perlindungan sosial bagi keluarga berpenghasilan rendah. Metode utama yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memerangi kemiskinan adalah sebagai berikut: Program pengembangan sumber daya lokal berbasis wilayah, penghargaan Pro

Poor, program peningkatan pemberdayaan masyarakat, kontes desa dan kecamatan, dan penciptaan wilayah yang saling berhubungan antar desa. Pendidikan masyarakat dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas masyarakat; sistem informasi untuk digunakan dalam profil desa dan kecamatan.

Menurut ADHB PDRB, perekonomian Kota Surabaya adalah Rp. 580.488.529,01 untuk periode tahun 2019, dan PDRB per kapita sebesar Rp98.778.360,36. Nilai PDRB Kota Surabaya menurut ADHB meningkat signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp495.043.304.500.000,- menjadi Rp547.769.496.960.000,- pada tahun 2018. PDRB periode tahun 2018 dapat mengalami kenaikan yang berbeda-beda pada kemampuan seseorang untuk bekerja dalam perekonomian, meskipun mungkin lebih besar dibandingkan tahun 2017. Penurunan angka kemiskinan di Surabaya menjadi bukti keberhasilan upaya pembangunan. Pertumbuhan ekonomi, yang dapat dilacak melalui pertumbuhan PDRB, dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan ekonomi. PDRB dan kemiskinan saling terkait, baik secara keseluruhan maupun dalam sektor ekonomi tertentu. Indikator pembangunan menurut Kuncoro dalam (Waruwu, 2016) meliputi: 1) indikator ekonomi, seperti GNP, GDP, dan laju PDRB; dan 2) indikator sosial, seperti IPM. Inflasi merupakan faktor lain yang mungkin berdampak pada tingkat kemiskinan. Situasi ekonomi yang disebut inflasi menaikkan harga secara umum.

Inflasi di Kota Surabaya bervariasi dan cenderung menurun antara tahun 2006 dan 2019. Perekonomian Kota Surabaya akan sangat diuntungkan dari hal ini karena tingkat inflasi yang lebih rendah berarti tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan efek yang terkait. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, tingkat inflasi Kota Surabaya sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 pada Maret 2018 sebesar 3,03 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,3 persen. Meski laju inflasi Kota Surabaya lebih tinggi dari Jawa Timur yang sebesar 3,16%, namun masih sejalan dengan target inflasi pemerintah 2017 sebesar 4,34%. Tingkat inflasi Kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 3,5 1%, sejalan dengan target tingkat inflasi pemerintah.

Pencapaian laju inflasi Kota Surabaya periode tahun 2018 sedikit meningkat dibandingkan tiga tahun sebelumnya, dimana inflasi Surabaya secara konsisten lebih tinggi dari Jawa Timur dan nasional, namun pada tahun 2018 masih lebih rendah dari nasional, meskipun lebih tinggi dari Jawa Timur. Penting untuk mencegah inflasi karena dapat merugikan perekonomian.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Kemiskinan

Istilah "kemiskinan" digunakan secara berbeda oleh para ahli dan organisasi internasional. Menurut Basri, kemiskinan diakibatkan oleh tidak adanya demokrasi, yang mencerminkan dinamika kekuasaan yang menghalangi warga negara untuk membuat keputusan yang mempengaruhi mereka secara langsung. Akibatnya, mayoritas penduduk kekurangan sumber daya (tanah dan teknologi) dan sarana produksi (pendidikan, dana/kredit, dan akses pasar). Sebaliknya, kemiskinan menurut definisi BPS (Badan Pusat Statistik) adalah ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kriteria minimum kebutuhan dasar, yang mencakup kebutuhan pangan dan non pangan. Definisi ini dimaksudkan untuk membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan GK, atau alokasi rupiah bulanan untuk konsumsi pribadi. Kemiskinan juga mengacu pada keterbatasan pilihan yang tersedia bagi seseorang, dan ini termasuk kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik sebagai tanda kemiskinan. Pada dasarnya, ada 5 cara untuk mendefinisikan kemiskinan, antara lain:

1. Kemiskinan Absolut

Gagasan ini menyatakan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai memiliki kebutuhan yang hanya dipenuhi oleh kebutuhan dasar, atau kebutuhan fisik minimal (KFM), untuk menjalani kehidupan yang baik. Seseorang dapat menggambarkan seseorang sebagai miskin jika pendapatannya berada di bawah ambang batas minimum. Oleh karena itu, jumlah uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pakaian, makanan, dan papan yang dijamin dapat digunakan kembali, digunakan untuk mengukur kemiskinan.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang yang sudah mendapatkan cukup uang untuk menutupi kebutuhan dasarnya dikatakan hidup dalam kemiskinan relatif, oleh karena itu miskin belum tentu miskin. Meskipun pendapatan telah meningkat hingga kebutuhan dasar terpenuhi, namun masih di bawah standar hidup di lingkungan sekitar, membuat individu tetap dalam kemiskinan. Hal ini terjadi karena faktor lingkungan kurang penting dalam menentukan kemiskinan dibandingkan faktor eksternal. Gagasan ini berpendapat bahwa ketika standar hidup masyarakat berubah, garis kemiskinan juga akan berubah. Ini menandakan misil akan

selalu ada karena konsep misinya dinamis. Akibatnya, sejumlah sarjana mendekati kemiskinan dari berbagai sudut ketidaksetaraan sosial. Seseorang yang sudah mendapatkan cukup uang untuk menutupi kebutuhan dasarnya dikatakan hidup dalam kemiskinan relatif, oleh karena itu miskin belum tentu miskin. Meskipun pendapatan telah meningkat hingga kebutuhan dasar terpenuhi, namun masih di bawah standar hidup di lingkungan sekitar, membuat individu tetap dalam kemiskinan. Hal ini terjadi karena faktor lingkungan kurang penting dalam menentukan kemiskinan dibandingkan faktor eksternal. Gagasan ini berpendapat bahwa ketika standar hidup masyarakat berubah, garis kemiskinan juga akan berubah. Ini menandakan misil akan selalu ada karena konsep misinya dinamis. Akibatnya, sejumlah sarjana mendekati kemiskinan dari berbagai sudut ketidaksetaraan sosial.

3. Kemiskinan Alamiah

Karena lingkungan setempat kekurangan sumber daya alam yang memadai, maka terjadilah kemiskinan. Akibatnya, penduduk setempat menjadi kurang produktif.

4. Kemiskinan Kultural

Orang-orang ini memiliki gaya hidup santai dan tidak ingin menaikkan taraf hidup mereka seperti peradaban kontemporer, yang berujung pada kemiskinan mereka.

5. Kemiskinan Struktural

Karena ketidakmampuan struktur sosial untuk menghubungkan individu dengan sumber daya yang tersedia, kemiskinan ada. Kemiskinan adalah tingkat terendah yang dicapai tergantung pada kondisi kehidupan rata-rata di suatu negara dan sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Setiap bangsa kini memiliki penduduk yang hidup dalam kemiskinan, menjadikan kemiskinan sebagai isu global. Pengaruh sosial yang begitu signifikan dalam mempersatukan manusia tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dunia yang semakin maju dan berkembang. Kemakmuran manusia tidak selalu merupakan hasil dari kemajuan di banyak bidang; sebaliknya, mereka berdampak pada munculnya tingkat kemiskinan baru, dan kapitalisme global juga menghasilkan kemiskinan baru.

Pertumbuhan Ekonomi

Ketika memeriksa kemajuan ekonomi suatu negara, pertumbuhan ekonomi adalah metrik yang sangat penting. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa besar kegiatan ekonomi masyarakat akan meningkatkan pendapatannya keseluruhan dari waktu ke waktu. Selain itu, jika semua

kompensasi aktual untuk penggunaan elemen produksi lebih tinggi dalam satu tahun daripada tahun berikutnya, ekonomi dikatakan tumbuh. Dengan kata lain, ekonomi dianggap tumbuh jika pendapatan riil seseorang dalam satu tahun lebih tinggi dari pendapatan riil seseorang pada tahun sebelumnya. Metrik yang dipilih lebih tinggi dari rata-rata pendapatan aktual tahunan populasi. Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil adalah statistik yang digunakan untuk mengukur ekspansi ekonomi.

Di bawah terdapat Indikator pertumbuhan ekonomi meliputi:

1. Pendapatan Nasional Riil

Perubahan pendapatan nasional riil terjadi ketika digunakan oleh suatu negara untuk menghitung biaya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang negara tersebut, ketika negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional riilnya naik atau naik relatif terhadap era sebelumnya. Perubahan pendapatan nasional riil terjadi ketika digunakan oleh suatu negara untuk menghitung biaya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang negara tersebut, ketika negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional riilnya naik atau naik relatif terhadap era sebelumnya.

2. Pendapatan Riil Perkapita

Diyakini bahwa suatu negara akan berkembang jika pendapatan rata-rata tahunan warganya meningkat. Diyakini bahwa suatu negara akan berkembang jika pendapatan rata-rata tahunan warganya meningkat.

3. Kesejahteraan Penduduk

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang telah dilakukan. Hal ini terlihat dalam distribusi produk dan layanan yang efisien di negara ini.

4. Tenaga Kerja dan Pengangguran

Jika suatu negara mencapai prospek lapangan kerja maksimum atau penuh dan tingkat reaksi di bawah 4%, negara itu dikatakan maju. Produk Domestik Bruto (PDB), yang mengukur seluruh pendapatan individu dalam suatu perekonomian, adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Produk Nasional Bruto (GNP) jarang digunakan karena hanya mencakup sebagian kecil negara yang bersangkutan. Jika suatu negara mencapai prospek lapangan kerja maksimum atau penuh dan tingkat reaksi di bawah 4%, negara itu dikatakan maju. Produk Domestik Bruto (PDB), yang mengukur seluruh pendapatan individu dalam suatu perekonomian, adalah indikator

yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Produk Nasional Bruto (GNP) jarang digunakan karena hanya mencakup sebagian kecil negara yang bersangkutan.

Inflasi

Inflasi, menurut teori Keynes, terjadi ketika individu ingin membelanjakan lebih dari yang mampu mereka beli. Selain pertumbuhan dan kebijakan yang harus mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah untuk mempertahankan tingkat yang stabil, di mana lagi inflasi harus menjadi variabel ekonomi makro? Karena inflasi merupakan elemen ekonomi yang signifikan, upaya akan diambil untuk mengurangi atau menghindari peningkatannya untuk mencegah kesulitan ekonomi makro yang nantinya dapat berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi.

Perekonomian suatu daerah dapat dipengaruhi oleh inflasi dengan cara yang baik dan buruk. Menurut Yudha (2019), dampak inflasi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu dampak terhadap perekonomian yang meliputi inflasi menjaga modal, suku bunga berpotensi menghambat investasi, defisit neraca perdagangan, dan peningkatan jumlah utang luar negeri, dan dampaknya terhadap orang/masyarakat, yang meliputi penurunan distribusi pendapatan, penurunan pendapatan riil, dan nilai tabungan yang baik. Misi dan tindakan keduanya sangat terhambat oleh inflasi.

Pengangguran

Di negara berkembang seperti Indonesia, pengangguran merupakan masalah yang rumit. Makroekonomi berbicara, tingkat respon yang tinggi merugikan ekonomi. Menurut Putri Nasution (2018), pengangguran memiliki kaitan yang buruk dengan kemiskinan karena dapat menghambat pembangunan ekonomi ketika terdapat banyak kegiatan di suatu wilayah. Menurut BPS (2020), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kemarahan. TPT adalah gambaran dari semangat yang ada antara individu yang ingin bekerja dan mereka yang memiliki sedikit atau tidak ada pengalaman. Bantuan bagi korban ledakan dan puing sangat penting. Selain itu, resistensi diklasifikasikan menurut fitur berikut:

1. Pengangguran Tersembunyi

Hal ini dapat terjadi jika perluasan tenaga kerja tidak menghasilkan tingkat output yang produktif. Hal ini dapat terjadi jika perluasan tenaga kerja tidak menghasilkan tingkat output yang produktif.

2. Pengangguran Musiman,

Hal ini dapat terjadi ketika industri pertanian dan perikanan mengalami perubahan musim. Hal ini dapat terjadi ketika industri pertanian dan perikanan mengalami perubahan musim.

3. Setengah Menganggur

Ini berkembang ketika orang sering bermigrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, menghilangkan beberapa dari mereka kesempatan kerja.

4. Pengangguran Terbuka

Terjadi ketika jumlah karyawan lebih banyak daripada jumlah lowongan kerja, yang berdampak pada bertambahnya jumlah orang yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. terjadi ketika jumlah karyawan lebih banyak daripada jumlah lowongan kerja, yang berdampak pada bertambahnya jumlah orang yang tidak dapat memperoleh pekerjaan.

Metodologi Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, atau diberikan dalam bentuk angka-angka yang awalnya membingungkan untuk membedakan satu sama lain atau membandingkan. Penulis menggunakan data sekunder, metodologi pengumpulan data, dan strategi pencarian yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya untuk mendapatkan data dan informasi untuk penelitian ini. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini juga meliputi membaca dan mengumpulkan sumber-sumber yang penting bagi permasalahan penelitian.

Teknik regresi linier berganda dan pengolahan data SPSS22 keduanya digunakan dalam analisis data. Dengan menggunakan perangkat lunak untuk memverifikasi signifikansi statistik variabel, analisis data selesai. Ini dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen dalam analisis yang dimaksud. Uji asumsi tradisional, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji linieritas, uji t, dan uji F, digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \beta_3 X_{t-3} + e_t$$

Dimana :

Y = Tingkat Kemiskinan

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien variable independen

X1 = Inflasi

X2 = Pertumbuhan Ekonomi

X3 = Pengangguran

t-1, t-2, t-3 = Variabel Bebas Pada Waktu

et = Error term

Hipotesis pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

H01 : Tidak adanya pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan

Ha1 : Adanya pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan

H02 : Tidak adanya pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan ekonomi

Ha2 : Adanya pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H03 : Tidak adanya pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Ha3 : Adanya pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas

Dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov, uji normalitas dapat dilakukan dengan syarat data berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dan sebaliknya. Data lulus uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan sig. sebesar 0,200 > 0,050, yang berarti terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Dalam regresi linier berganda, multikolinearitas mengacu pada hubungan linier yang terdefinisi secara lengkap atau tepat antara variabel bebas; mungkin ada atau mungkin tidak ada hubungan seperti itu. Setelah dilakukan uji analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa keberadaan ketiga variabel bebas (VIF untuk X1 adalah 1,535; X2 adalah 1,354; dan X3 adalah 1,338) menjelaskan mengapa ketiga variabel bebas tersebut lebih kecil dari 10, hal ini menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak terjadi pada model regresi ini. Dalam regresi linier berganda, multikolinearitas mengacu pada hubungan linier yang terdefinisi secara lengkap atau tepat antara variabel bebas; mungkin ada atau mungkin tidak ada hubungan seperti itu. Setelah dilakukan uji analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa keberadaan ketiga variabel bebas (VIF untuk X1 adalah 1,535; X2 adalah 1,354;

dan X3 adalah 1,338) menjelaskan mengapa ketiga variabel bebas tersebut lebih kecil dari 10, hal ini menunjukkan bahwa multikolinieritas tidak terjadi pada model regresi ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari uji sig dimasukkan ke dalam uji Glejser. Tidak terdapat tanda heteroskedastisitas pada model regresi karena variabel inflasi $0,643 > 0,05$, variabel pertumbuhan ekonomi $0,324 > 0,05$, dan variabel exercise $0,294 > 0,05$. Hasil dari uji sig dimasukkan ke dalam uji Glejser. Tidak terdapat tanda heteroskedastisitas pada model regresi karena variabel inflasi $0,643 > 0,05$, variabel pertumbuhan ekonomi $0,324 > 0,05$, dan variabel exercise $0,294 > 0,05$.

4. Uji Autokorelasi

Dari hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson sejumlah 2,003 dari tabel DW didapatkan nilai DU sebesar 1,7788. Apabila berdasarkan rumus dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rumus: $DU < DW < 4 - DU$

$1,7788 < 2,003 < 4 - 1,7788$

$1,7788 < 2,003 < 2,2212$

Uji Hipotesis

1. Uji t parsial

Jelas dari hasil perhitungan output SPSS bahwa faktor-faktor independen memiliki efek berikut pada variabel dependen:

- a) **Variabel Inflasi** nilai tabel 1,76131, nilai statistik absolut tabel (0,797 2,228), dan nilai statistik 0,797 pada ambang batas signifikan 0,05 persen, menunjukkan bahwa H01 tidak diterima.
 - b) **Variabel Pertumbuhan Ekonomi** memiliki nilai statistik 0,467 pada taraf signifikan 0,05 persen, dan H02 ditolak jika nilai tabel 1,76131 (0,467 2,228).
 - c) **Variabel Pengangguran** memiliki nilai T statistik absolute $> T$ tabel ($3,411 > 2,228$) dan nilai T statistik sebesar 3,411 pada ambang batas signifikan = 0,05 persen, artinya H03 diterima.
2. Untuk uji f secara simultan diperoleh nilai F estimasi sebesar 5.814 dengan tingkat signifikansi 0,005, sedangkan nilai F tabel sebesar ($= 0,05$) dengan derajat kebebasan (df1)3 (jumlah variabel independen/k) dan df2 9 (n-k-1) dan hasilnya

menjadi 8,81. Dengan menyimpulkan bahwa H_0 ditolak dari temuan, dapat diketahui bahwa $F_{hitung} 5,814 > F_{tabel} 8,81$.

2. Uji f simultan

Diperoleh nilai F hitung sebesar 5,814 pada tingkat signifikansi sebesar 0,005 melainkan, nilai F tabel = ($\alpha = 0,05$) dengan degree of freedom (df1)3 (jumlah variabel bebas/k) dan df2 9 ($n-k-1$) memperoleh nilai F tabel sebesar 8,81. Dari hasil dapat diketahui bahwa $F_{hitung} 5,814 > F_{tabel} 8,81$ dan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak.

Koefisien Determinan (R²)

Hasil uji yang tercantum pada tabel Model Summary, nilai R-Square adalah 0,660 yang artinya variabel Y berpengaruh oleh variabel X1, X2 dan X3 secara bersamaan sebesar 66% dan sisanya sebesar 34% dipengaruhi oleh variabel lain pada luar penelitian.

Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan

Hasil Uji Inflasi (X1) menunjukkan bahwa hasil H_{01} tidak diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara inflasi dan kemiskinan, sehingga tidak mungkin untuk mengevaluasi temuan tersebut. Kebanyakan orang menganggap inflasi sebagai masalah serius yang harus ditangani sekarang. Salah satu tujuan kebijakan stabilitas harga, strategi ekonomi, adalah untuk menurunkan tingkat inflasi.

1. Pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan ekonomi

Hasil uji PDRB (X2) menunjukkan bahwa H_{02} ditolak; karenanya, tidak ada hubungan antara kemiskinan dan pembangunan ekonomi, sehingga tidak mungkin untuk ditafsirkan. Hal ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan saat ini tidak akan mungkin dilakukan dengan peningkatan PDRB dalam waktu dekat. Perekonomian yang tinggi tidak dapat menjamin akan menurunkan jumlah penduduk miskin, karena fenomena ini disebabkan oleh disparitas pembangunan yang terjadi pada lapisan masyarakat paling bawah.

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Menurut hasil uji Pengangguran antara Pengangguran terhadap kemiskinan oleh karena itu H_{03} diterima. Guna mengurangi angka kemiskinan, maka angka pengangguran juga harus dikurangi, penurunan tingkat kemiskinan akan berhasil jika lapangan kerja mampu menyerap

pekerja yang ada, terutama dalam sektor-sektor industri dan meluas disetiap golongan pendapatan, termasuk dikategori masyarakat miskin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penyelidikan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa inflasi tidak berdampak pada kemiskinan, dan inflasi moderat di Jawa Timur memiliki efek positif dan netral. Hal yang baik tentang inflasi adalah dapat mendorong ekonomi yang lebih kuat dengan meningkatkan pendapatan nasional dengan memotivasi orang untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Individu, perusahaan, dan pemerintah semuanya dipengaruhi oleh inflasi. Tingkat kemiskinan di Surabaya dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi secara keseluruhan, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara PDRB dengan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan dipengaruhi secara negatif oleh pengangguran karena banyak pekerja di industri pertanian mendukung hampir seluruh keluarga, tetapi upah mereka yang rendah tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar. Dalam hal rekomendasi yang dapat dibuat berdasarkan temuan studi ini dan kesimpulannya, juga diusulkan agar pemerintah melakukan tindakan yang lebih sedikit, yaitu dengan meningkatkan kesempatan kerja bagi setiap warga negara untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, R., & Rachmawati, L. (2022). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Surabaya. *Independent: Journal of Economics*, 2(1), 175-186. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i1.46004>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2018). *Profil Kemiskinan di Kota Surabaya Tahun 2018*. Badan Pusat Statistik. Surabaya. Diakses dari <http://dpm-ptsp.surabaya.go.id/v3/po-content/po-upload/pdrb-2010-2016/Profil-Kemiskinan-Kota-Surabaya-2018.pdf>.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2018). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. Badan Pusat Statistik. Surabaya. Diakses dari <https://surabayakota.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.
- Budi, P., & Renta, Y. (2021). Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2015-2019. *Jurnal Economia*, 2(2), 47-53.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. (2022). *Kemiskinan dan Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi Surabaya Lampau Nasional, Tahun 2022 Wali Kota Eri Cahyadi Targetkan Meningkatkan*. Badan Pusat Statistik. Surabaya. Diakses dari <http://dpm-ptsp.surabaya.go.id/v3/detailpost/pertumbuhan-ekonomi-surabaya-lampau-nasional-tahun-2022-wali-kota-eri-cahyadi-targetkan-meningkat>.

- Mahsunah, D. (2013). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3), 1–17.
- Salman, G. (2022). Angka Kemiskinan di Surabaya Naik Jadi 5,23 Persen Akibat Covid 19. Kompas. Available at <https://amp.kompas.com/surabaya/read/2022/01/03/115632078/angka-kemiskinan-di-surabaya-naik-jadi-523-persen-akibat-covid-19>, diakses tanggal 18 Mei 2023
- Widiana, E. (2023). Inflasi Surabaya Lebih Tinggi Dibanding Nasional. Detik. Available at <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6622659/inflasi-surabaya-lebih-tinggi-dibanding-nasional/amp>, diakses tanggal 18 Mei 2023